

PERAN DAN FUNGSI PERANGKAT / PEJABAT KESULTANAN BUTON PADA ABAD KE-20

Munawir Mansyur

Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Jalan Sultan Dayanu
Ikhsanuddin No 124 Baubau, Sulawesi Tenggara 93721, Indonesia

Email : awirjrt099@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah : 1) latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20; 2) bagaimana peran dan fungsi pejabat kesultanan buton pada abad ke-20; Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk menjelaskan latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20; 2) untuk mengetahui peran dan fungsi pejabat kesultanan buton pada abad ke-20; Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan pendekatan analisis deskriptif kualitatif.

Dari Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20 yaitu Deskripsi tentang wilayah kekuasaan Buton dalam konstruksi kolonial secara jelas baru dapat diketahui dalam abad ke-19 yakni mencakupi pulau Muna, yang dimana Muna adalah Pangsane atau Pancano yang diberikan oleh orang Ternate dan orang Buton menyebutnya sebagai daerah Pancana. Perangkat atau pejabat kesultanan buton yang dimaksudkan yaitu Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut: Eksekutif = Sara Pangka; Legislatif = Sara Gau; Yudikatif = Sara Bitara. Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi; Fraksi rakyat = Beranggotakan 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton; Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.;Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukum yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton. Wilayah Kesultanan meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pula Wawonii dan Jazirah Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang "Murtabat Tujuh Kesultanan Buton" ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579- 1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.2) Dalam sejarah kesultanan Buton dari zaman Sultan dayanu ikhsanuddin (La Elangi) sampai dengan zaman pemerintahan Sultan Falihi bahwa dijelaskan perangkat atau pejabat kesultanan buton sampai dengan pada abad ke-20 yaitu mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :1) Sultan; 2) *Pasopitumatana*; 3) Siolimbona; 4) *Sarana Hukumu* dan beberapa pejabat penting yang ada di dalam sistem pemerintahan kesultanan Buton. Dari kesemua perangkat atau pejabat kesultanan buton dari zaman La Elangi sampai dengan Sultan Falihi tentunya masih mempunyai peran dan fungsi yang sama sampai sekarang ini.

Kata Kunci : Peran Pejabat Kesultanan Buton Abad ke-20

I. PENDAHULUAN

Kesultanan Buton wilayah yang meliputi di jazirah tenggara Sulawesi di Propinsi Sulawesi Tenggara. Pada saat sekarang meliputi delapan Kabupaten/Kota yaitu, Kota Bau-Bau, Kabupaten Buton, Kabuapten Muna, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Buton Tengah dan Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Muna Barat dan Kabupaten Bombana. Dalam bahasan ini tidak akan dibahas lebih jauh mengenai hal tersebut, tetapi yang menjadi fokus kajian adalah mengenai peran dan fungsi pejabat kesultanan buton pada abad ke XX.

Sebelum membahas dan menjelaskan mengenai peran dan fungsi pejabat di kesultanan buton tentunya harus ada pemahaman dan pengetahuan mengenai kesultanan buton khususnya sejarah adanya pulau buton yang sampai saat ini sudah menjadi daerah otonom baru yang sekiranya sudah di nikmati sebagian dari bagian-bagian daerah kesultanan buton di masa lampau.

Berkenaan dengan asal usul penanaman Buton, terdapat beberapa versi. Versi pertama menyatakan bahwa nama Buton berasal dari nama sejenis pohon, yaitu pohon “butun” yang batangnya rendah dekat dengan tanah, daun lebar, memiliki buah (tetapi tidak untuk di makan) (Heyne, 1987: 1480). Versi kedua bersumber dari rangkaian syair *Kanturuna Mohela* (lampu orang berlayar) yang menyebutkan bahwa kata Buton bersumber dari kata Arab “Batnun” yang berarti “perut”.

Kerajaan Buton merupakan univikasi dari beberapa kerajaan kecil di wilayah daratan Pulau Buton. Kerajaan-kerajaan tersebut melakukan kesepakatan setelah datangnya orang-orang Melayu yang dipimpin empat orang yaitu, Sipanjonga, Simalui, Sijawangkti, dan Sitamanajo. Kedatangan orang-orang tersebut terdiri dari dua kelompok yaitu, Sipanjonga bersama Sijawangkti dan kelompok kedua Simalui bersama Sitamanajo. Keempat orang tersebut diperkirakan berasal dari Melayu namun belum didapat informasi yang sangat detail tentang daerah asalnya. Dalam sebuah tradisi masyarakat Buton disebutkan bahwa keempat orang tersebut berasal dari Pulau Lia.

Kisah *Mia Patamiana* menceritakan bahwa sesampainya empat orang tersebut di Pulau Buton, mereka segera “menebas” hutan belukar untuk tempat tinggal. Dalam Bahasa Wolio penebasan hutan belukar disebut dengan kata *Welia*. Dari kata *Welia* itulah kemudian muncul penamaan Wolio. Adapun istilah Buton dan Wolio tetap digunakan sampai sekarang yang menunjukkan nama sebuah Kabupaten di Propinsi Sulawesi Tenggara dan nama sebuah pulau dibagian Tenggara Pulau Sulawesi, sedangkan yang kedua digunakan untuk menunjukkan nama benteng Ibukota Kesultanan Buton penghuni bekas pusat kesultanan tersebut bagi Orang Wolio dan nama Kecamatan dalam Kota Baubau,.

Menurut cerita legenda setempat, raja pertama Kerajaan Wolio adalah seorang perempuan yang bernama Wa Kaa Kaa. Berdasarkan legenda dari masyarakat setempat Wa Kaa Kaa ditemukan dari sebilah bambu di atas sebuah bukit yang disebut dengan bukit *lelemangura* (Bukit Keraton) yaitu suatu kawasan perbukitan kecil yang letaknya di dalam benteng keraton Buton. Para pemuka masyarakat saat itu mengangkat Wa Kaa Kaa sebaga raja dan diberi julukan *Mobentena Yitombula* (gadis yang keluar dari dalam bambu). Selanjutnya, ada lima orang raja lagi yang memerintah Kerajaan Wolio, yaitu Bulawambona, Bataraguru, Tua Rade, Raja Mulae, dan Lakilaponto. Pada masa pemerintahan Raja Buton pertama sampai keenam, yaitu abad ke-14 sampai abad ke-16, masyarakat Buton menganut kepercayaan agama Animisme/Dinamisme dan Totemisme (Zuhdi, 1996: 11).

Setelah terbentuknya Wolio sebagai daerah kerajaan, maka dipandang perlu adanya beberapa perangkat kerajaan agar dapat membantu raja dalam menjalankan roda pemerintahan. Oleh sebab itu, sejak ditunjuknya Wa Kaa Kaa sebagai raja, maka sejak saat itu pula dibentuk berbagai kelengkapan perangkat kerajaan dan pada wilayah-wilayah yang berintegrasi (berunivikasi) dan pimpinan wilayahnya tetap bertugas untuk mengurus wilayahnya masing-masing.

Setelah masuknya Islam di Wolio, maka dikenal pula mitos yang bercorak Islam. Di lihat lapisan-lapisan mitos yang muncul dalam konteks asal usul, maka corak ini merupakan lapisan yang berdasarkan Islam. Mitos asal-usul tentang

penduduk Buton dimulai dari : “perjalanan Nabi Muhammad ke suatu pulau di timur yang muncul dari lautan dan belum berpenduduk. Kembalilah ia kepada Tuhan menyampaikan apa yang dilihatnya. Tuhan yang mengenaalnya kira-kira sama dengan “Tanah Roem”. Tuhan bertanya kepada Nabi Muhammad: “apa nama tanah itu” di jawab:” *Butu’ni*”. Tapi arti kata ini tidak diketahui “ (Zuhdi, 2010: 74).

Sejak awal terbentuknya kerajaan telah ada majelis rakyat atau yang dikenal dengan *Patalimbona* (empat kampung) yang kemudian berkembang menjadi *siolimbona* (sembilan kampung). Demikian halnya dengan *Sapati*, *Bontogena*, dan beberapa jabatan lainnya seperti *Kenepulu*, *Kapitalao/Kapitaraja*, *Bobato*, *Bonto*, *lakina agama*, *imamu*, *Modji*, *Mokimu*, *Bontona Peropa*, *Bontona Baluwu*, *Bontona Gundu-Gundu*, *Bontona Agama*, *Bontona Barangkatopa*, *Bontona Siumpu*, *Bontona Wandailolo*, *Bontona Rakia* dan *Bontona Melai* . Perkembangan dan tambahan perangkat pemerintahan kerajaan bertambah setelah zaman pemerintahan Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1610-1633) dan Sultan Muhammad Idrus Kaimuddin (1824-1856).

Kesultanan Buton adalah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Baubau, Sulawesi Tenggara, antara abad ke-16 hingga abad ke-20. Selama berkuasa, kesultanan ini memiliki sistem pemerintahan dan undang-undang yang berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara. Selain itu, Kesultanan Buton juga berhasil mempertahankan kedaulatannya meski berkali-kali terlibat perang dengan Belanda.

Mengenai Istana sultan bahwa setiap masyarakat Buton khususnya yang telah dipilih oleh dewan pemerintahan kesultanan (*siolimbona*), tempat tinggal sultan yang akan ditinggali oleh sultan terpilih itu dijadikan sebagai *malige* atau Istana Sultan, hal ini menyebabkan Buton memiliki istana secara khusus. Sebagai seorang sultan maka tentu diatur berdasarkan aturan-aturan yang disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian seorang sultan diatur oleh orang-orang yang telah ditunjuk untuk membantunya. Disamping itu, dalam filosofi Buton dikenal pula bahwa “sultan disumpah baru bisa mendapatkan makanan/ makan”. Hal ini mengandung makna bahwa sultan tidak dapat berbuat berdasarkan sekehendak hati

atau keinginannya semata, tetapi telah diatur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam masyarakat berdasarkan adat.

Berbeda dari kerajaan-kerajaan di Nusantara yang menerapkan monarki absolut, bentuk pemerintahan Kesultanan Buton adalah monarki konstitusional. Sehingga, pada periode kerajaan berubah menjadi kesultanan, demokrasi memegang peranan penting. Sultan bukan diwariskan berdasarkan keturunan saja, tetapi dipilih oleh Siolimbona, yakni dewan yang terdiri dari sembilan orang penguasa dan penjaga adat Buton. Selain itu, kesultanan ini memiliki undang-undang sendiri, lengkap dengan badan-badan yang bertindak sebagai legislatif, yudikatif, dan eksekutif.

Undang-undang di Kesultanan Buton disebut Murtabat Tujuh, yang diresmikan oleh Sultan La Elangi (1597-1631) dan digunakan hingga kesultanan dihapuskan. Unikny, hukum di Kesultanan Buton ditegakkan bagi semua orang, tidak hanya rakyat jelata tetapi juga pejabat istana atau bahkan sultan sekalipun. Terbukti, selama empat abad berdiri, terdapat 12 sultan Buton yang dihukum karena melanggar undang-undang. Kesultanan Buton juga memegang lima falsafah hidup, yakni agama (Islam), Sara (pemerintah), Lipu (negara), Karo (diri pribadi/rakyat), dan Arataa (harta benda).

Nilai-nilai budaya Buton sampai saat ini masih membekas dalam memori kolektif masyarakatnya. Nilai-nilai budaya itu bersumber dari falsafah *Bhincibhinciki kuli* yang mengandung makna yang hakiki dan universal yakni setiap orang bila mencubit dirinya sendiri akan terasa sakit; karena itu janganlah mencoba mencubit kulit orang lain sebab ia pun merasa sakit dan akan menimbulkan reaksi perlawanan yang bersangkutan. Falsafah dasar *bhincibhinciki kuli* mengandung empat nilai yang menjadi pedoman masyarakat Buton dalam berperilaku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat. Keempat nilai tersebut yakni : (a) *pomae maeka* (saling takut melanggar hak asasi orang lain); (b) *po maa maasiaka* (saling menyayangi); (c) *po pia piara* (saling memelihara); (d) *po angka angkataka* (saling menghormati dan menghargai jasa sesama kita).

Nilai-nilai budaya Buton telah terkontaminasi dengan hadirnya budaya barat, sehingga nilai-nilai budaya Buton yang dulu sangat dicerminkan dan diterapkan oleh leluhur Buton tersebut akan luntur. Oleh karena itu, sejak zaman kerajaan sampai sekarang tidak akan pernah berbeda sepanjang masyarakat Buton masih mau peduli dan konsisten dengan hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai budaya Buton.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20?
2. Bagaimana peran dan fungsi pejabat kesultanan buton pada abad ke-20;

Dalam menganalisis kajian ini maka menggunakan teori sejarah dimana menurut Kartodirjo (1993: 15) mengatakan bahwa teori sejarah itu merupakan proses sejarah dalam aktualisasinya dimana kejadian itu sekali terjadi tidak dapat di ulang atau terulang lagi sehingga proses kejadian sejarah itu hanya dapat di amati dan diikuti sebagian dari totalitas kejadian atau peristiwa sejarah itu terjadi.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian sejarah dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang berusaha untuk menafsirkan fenomena yang di alami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan wawancara terbuka (lisan) untuk memahami persepsi dan pandangan para responden (Moleong, 2004: 4-6) yang hasilnya kemudian di deskripsikan penulis.

Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini akan diklarifikasikan antara lain sumber data primer dan sekunder;

1. Sumber data Primer
2. Sumber data sekunder

Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

a. Instrumen

Instrumen penelitian ini yang digunakan adalah sistem dengan cara *sample bola salju (snow ball sampling)* dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan pertama dan menjadikan informan pertama sebagai sumber untuk mendapatkan informan dari narasumber selanjutnya.

b. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini terlebih dahulu diadakan kegiatan kegiatan CLM (Covering Low Model) yang terdiri dari kondisi, situasi, dan konsep yang digunakan dalam penelitian. Kegiatan CLM ini meliputi observasi (pengamatan), teknik wawancara (interview), dan studi dokumen: 1) Observasi (Pengamatan); pengamatan secara langsung dalam rangka mengumpulkan data sesuai dengan masalah yang diteliti; 2) Teknik wawancara ; Pengumpulan data yang dilaksanakan secara lisan dan tatap muka langsung informan atau narasumber yang berhubungan dengan masalah penelitian; 3) Studi Dokumen ; Pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis dan dokumen fisik sesuai dengan tujuan dan permasalahan.

Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data atau informasi yang diperoleh di kegiatan CLM dan hermeneutic yaitu dengan melakukan penyaringan dan seleksi data yang bertujuan untuk mengambil dan menguji apakah data tersebut bersifat formal, asli atau palsu dengan melalui kritik eksteren dan kritik interen terhadap sumber yang diperoleh. Kritik intern (dalam) saha untuk menentukan atau menyeleksi kredibilitas sumber-sumber sejarah yang telah terkumpul. Kritik intern mengacu pada kebenaran isi dari sumber-sumber sejarah sedangkan kritik eksteren (luar), yang diteliti apakah dokumen itu autentik, yaitu menyatakan identitas. Jadi bukan palsu, semua dilakukan

dengan meneliti bahan yang dipakai, jenis tulisan, gaya bahasa, dan sebagainya (Kartodirdjo, 1992: 16).

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20

Kesultanan Buton terletak di Kepulauan Buton (Kepulauan Sulawesi Tenggara) Provinsi Sulawesi Tenggara, di bagian Tenggara Pulau Sulawesi. Pada zaman dahulu memiliki kerajaan sendiri yang bernama kerajaan Buton dan berubah menjadi bentuk kesultanan yang dikenal dengan nama Kesultanan Buton. Nama Pulau Buton dikenal sejak zaman pemerintahan Majapahit, Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa, menyebut nama Pulau Buton.

Riwayat lain mengatakan tahun 1564 M. Walau bagaimanapun masih banyak pertikaian pendapat mengenai tahun kedatangan Syekh Abdul Wahid di Buton. Oleh itu dalam artikel ini dirasakan perlu dikemukakan beberapa perbandingan. Dalam masa yang sama dengan kedatangan Syekh Abdul Wahid bin Syarif Sulaiman al-Fathani, diriwayatkan bahwa di Callasung (Kulisusu), salah sebuah daerah kekuasaan Kerajaan Buton, didapati semua penduduknya beragama Islam.

Selain pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Johor, ada pula pendapat yang menyebut bahwa Islam datang di Buton berasal dari Ternate. Dipercayai orang-orang Melayu dari berbagai daerah telah lama sampai di Pulau Buton. Mengenainya dapat dibuktikan bahwa walaupun Bahasa yang digunakan dalam Kerajaan Buton ialah bahasa Wolio, namun dalam masa yang sama digunakan Bahasa Melayu, terutama bahasa Melayu yang dipakai di Malaka, Johor dan Patani. Orang-orang Melayu tinggal di Pulau Buton, sebaliknya orang-orang Buton pula termasuk kaum yang pandai belayar seperti orang Bugis juga.

Buton sesungguhnya merupakan sebuah pulau yang berada pada bagian Tenggara pulau Sulawesi. Daerah ini sejajar dengan pulau Muna yang hanya pisahkan oleh selat yaitu selat Buton. Seiring dengan hal tersebut. Zuhdi (2010: 3) menjelaskan pula hal yang sama bahwa Buton merupakan daerah yang terletak di bagian Tenggara

Pulau Sulawesi, berada dalam jalur pelayaran yang menghubungkan Makassar dan Maluku. Pada masa silam munculnya sistem pelayaran dan pergangan di nusantara wilayah ini menjadi sebuah wilayah yang sangat strategis yang menghubungkan wilayah kedua wilayah yaitu, Makassar (Gowa) dan Ternate.

Deskripsi tentang wilayah kekuasaan Buton dalam konstruksi kolonial secara jelas baru dapat diketahui dalam abad ke-19 yakni mencakupi pulau Muna, yang dimana Muna adalah Pangsane atau Pancano yang diberikan oleh orang Ternate dan orang Buton menyebutnya sebagai daerah Pancana. Adapun wilayah kekuasaan Buton menyatu dengan daratan pulau Sulawesi yakni poleang dan Rumbia. Kedua daerah ini berbatasan di sebelah barat dengan wilayah Luwu, sebelah utara dengan Laiwui dan sebelah timur dengan Selat tiworo (Zuhdi, 2010: 39). Ada satu pulau lagi yang di akui dengan wilayah kekuasaan Buton yakni Wowonii, terletak di sebelah utara pulau Buton. Akan tetapi pulau ini masih menjad pertikaian antara Buton dengan Ternate sampai pertengahan abad ke-19. Selain itu, dua wilayah di Buton yang menjadi lingkungan pengaruh Ternate adalah Tiworo dan Kalisusu.

Kerajaan Buton berdiri tahun 1332 M. Awal pemerintahan dipimpin seorang perempuan bergelar Ratu Wa Kaa Kaa. Kemudian raja kedua pun perempuan yaitu Ratu Bulawambona. Setelah dua raja perempuan, dilanjutkan Raja Bataraguru, Raja Tuarade, Raja Rajamulae, dan terakhir Raja Murhum. Ketika Buton memeluk agama Islam, maka Raja Murhum bergelar Sultan Murhum.

Kerajaan Buton didirikan atas kesepakatan tiga kelompok atau rombongan yang datang secara bergelombang. Gelombang pertama berasal dari kerajaan Sriwijaya. Kelompok berikutnya berasal dari Kekaisaran Cina dan menetap di Buton. Kelompok ketiga berasal dari Kerajaan Majapahit. Sistem kekuasaan di Buton ini bisa dibilang menarik karena konsep kekuasaannya tidak serupa dengan konsep kekuasaan di kerajaan-kerajaan lain di nusantara. Struktur kekuasaan kesultanan ditopang dua golongan bangsawan: golongan Kaomu dan Walaka. Wewenang pemilihan dan pengangkatan sultan berada di tangan golongan Walaka, namun yang menjadi sultan harus dari golongan Kaomu. Jadi bisa dikatakan kalau seorang raja

dipilih bukan berdasarkan keturunan, tetapi berdasarkan pilihan di antara yang terbaik.

Kelompok Walaka yang merupakan keturunan dari Si Panjonga memiliki tugas untuk mengumpulkan bibit-bibit unggul untuk dilatih dan dididik sedemikian rupa sehingga para calon raja memiliki bekal yang cukup ketika berkuasa nanti. Berdasarkan penelitian, Ratu Waa Kaa Kaa adalah proyek percobaan pertama kelompok Walaka ini. Selain sistem pemilihan raja yang unik, sistem pemerintahannya juga bisa dikatakan lebih maju dari zamannya. Sistem pemerintahan kerajaan/kesultanan Buton dibagi dalam tiga bentuk kekuasaan. Sara Pangka sebagai lembaga eksekutif, Sara Gau sebagai lembaga legislatif, dan Sara Bhitara sebagai lembaga yudikatif.

Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut:

Eksekutif = Sara Pangka

Legislatif = Sara Gau

Yudikatif = Sara Bitara

Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi

Fraksi rakyat = Beranggotakan 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton.

Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.

Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukum yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton.

Wilayah Kesultanan Buton yang berawal dari empat negeri tersusun dalam suatu sistem tata pemerintahan dimana tiap-tiap wilayah besar dan kecil menempatkan dirinya sesuai dengan sejarah dan tradisinya masing-masing. Wilayah Kesultanan Buton tersebut terdiri atas Wilayah Inti, Moronene dan Barata. Dalam perkembangannya setelah agama Islam menjadi agama resmi bagi masyarakat Kerajaan Buton. Wilayah Kesultanan ya meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pula Wawonii dan Jazirah

Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang "Murtabat Tujuh Kesultanan Buton" ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579- 1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.

Pertama: Pemerintahan Pusat "Sarana Wolio" meliputi tiga unsur yaitu; (1) Sultan, (2) Badan Sarana Wolio yang terdiri atas Pasopitumatana, Siolimbona, Sarana Hukumu dan (3) Staf khusus kesultanan; Kedua: Pemerintahan Wilayah "Sarana Kadie" meliputi para Bobato, Bonto, Parabela, Akanamia, Kaosa dan Talombo.

Keliga: Pemerintahan Barata "Sarana Barata", meliputi Lakina/ Kepala Barata, sapati, Kanepulu, Bonto Ogena, Kapatilau, dan Lakina Agama. Dengan susunan dan tingkatan seperti demikian maka jabatan tertinggi adalah Sultan. Pada tingkat pemerintahan wilayah (Kadie) 27 dipimpin Babato atau Bonto dan pada tingkat pemerintahan Barata dipimpin oleh Lakina Barata.

2. Peran dan fungsi pejabat kesultanan buton pada abad ke-20

Di bekas Kesultanan Buton di bedakan empat lapisan masyarakat; 1) kaum *kaomu*, dari golongan ini sultan dipilih dan beberapa kedudukan tertentu dicadangkan bagi mereka; 2) kaum *walaka*, yang juga tergolong elit penguasa: para wakil walaka memilih sultan; 3) kaum *papara*, penduduk desa, yang hidup dalam masyarakat yang agak otonom, dan 4) kaum *batua*, budak, yang biasanya bekerja untuk para *kaomu* dan *walaka*. setelah 1960 budak menjadi orang merdeka, namun lama kedudukan mereka membaik (Schoorl, 2003: 9).

Pada masa kejayaannya, Kesultanan Buton pernah menguasai Pulau Buton dan beberapa wilayah di provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mendukung pemerintahannya, kesultanan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Pulau Jawa. Hubungan itu membuat perekonomian Kesultanan Buton berkembang pesat, terutama dalam sektor perdagangan. Terlebih lagi, Buton termasuk wilayah strategis, yang sering dilalui oleh kapal dagang dari mancanegara. Selain itu, produksi rempah-rempahnya juga meningkat tajam.

Dalam sejarah kesultanan Buton dari zaman Sultan dayanu ikhsanuddin (La Elangi) sampai dengan zaman pemerintahan Sultan Falihi bahwa dijelaskan perangkat atau pejabat kesultanan buton sampai dengan pada abad ke-20 yaitu mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut : 1) **Sultan**, adalah kepala Negara yang memimpin pemerintahan, pemimpin umat dan keagamaan yang memegang kebijaksanaan dan keadilan tertinggi. Dalam rangka mengemban tugas yang mengabdikan kepada kepentingan dan kemaslahatan rakyat lahir dan bathin. Sultan menjalankan kekuasaan Eksekutif dan Yudikatif; 2) **Pasopitumatana** yang berfungsi sebagai Kabinet Kesultanan yang membantu tugas-tugas Sultan. Dewan Kabinet ini terdiri dari : Sapati, Kenepulu, Kopitalao, Bontoogema, Lakina Sarawalio dan Lakina Ba'adia. Adapun tugas masing-masing pejabat (pangka) ini adalah sebagai berikut : a) Sapati, adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan (Kaomu), sebagai Ketua Dewan Kabinet atau Perdana menteri yang mengurus pemerintahan, berfungsi sebagai pelindung Sultan dan rakyat. Dalam melaksanakan tugas bertindak tegas terhadap pelanggar hukum adat; b) Kanepulu, adalah jabatan yang dipegang oleh golongan bangsawan (Kaomu) dengan tugas utamanya adalah menampung aspirasi rakyat dan diteruskan kepada Dewan Sara, disamping bersama-sama Sapati membantu Sultan; c) Kapitalao atau Kapitaraja adalah jabatan untuk golongan bangsawan (Kaomu), Kapitalao dipegang dua orang sebagai menteri pertahanan dan panglima perang; d) Bonto Ogena, jabatan ini untuk golongan Walaka yang terdiri dari dua orang. Dalam Dewan Kabinet Pasopitumatana sebagai lembaga Eksekutif, Bonto Ogena adalah salah satu anggota kabinet. Sedang dalam Dewan Siolimbona sebagai badan Legislatif, Bonto Ogena sebagai Ketua Dewan yang anggotanya adalah menteri-menteri (Bonto Siolimbona). Tugas yang diemban oleh Bonto Ogena dalam pemerintahan kesultanan adalah mengawasi dan mamajukan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan usul serta kehendak rakyat; e) Lakina Agama (Kadhi) adalah Jabatan untuk golongan bangsawan (Kaomu). Dalam Dewan Kabinet Pasopitumatana ia sebagai anggota, sedangkan dalam Sarana Hukumu (Lembaga Keagamaan) ia sebagai Kepala; f) Lakina Sarawolio dan Lakina Baadia, (Kepala Wilayah/ Raja Daerah

Khusus), adalah jabatan yang diberikan kepada golongan bangsawan (Kaomu), sebagai penguasa daerah khusus ibu kota (Keraton Wolio) bertugas melancarkan pelaksanaan pusat pemerintahan Kesultanan, tugas utamanya adalah mengawasi keamanan dan ketentraman umum yaitu 1) Siolimbona; Sio = Sembilan, Limbo= Kampung/kadie. Bonto Siolimbona, adalah sembilan Kepala-Kepala Wilayah pemerintahan Daerah. Siolimbona ini dapat dipandang sebagai Badan Perwakilan Rakyat (Legislatif). Jabatan ini diberikan kepada golongan "Walaka" yang dipimpin oleh Bonto Ogena (Mantri Besar). Siolimbona juga merupakan Dewan Sarana Wolio atau dewan kesultanan.; 2) *Sarana Hukumu*; adalah hadan yang bertugas mengurus dan mengawasi masalah-masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan ajaran Islam dan masalah-masalah ibadah. Badan Sarana Hukumu ini dipimpin oleh Lakina Agama. Adapun Staf khusus kesultanan antara lain : a) Bantoyunca atau Staf Istana; b) Bontona Lencina Kanjawari, selaku staf khusus yang berkaitan dengan tugas-tugas tertentu.; c) Staf lainnya seperti Juru Basa (juru bahasa), Sabandara, Talombo, dan Pangalasa

Pemerintahan kadie adalah bagian wilayah yang mempunyai hukum adat dan majelis sendiri yang disebut "Sarana kadie". Kedudukannya dalam organisasi pemerintahan adalah wilayah-wilayah yang terdiri dari 72 Kadie yang mempunyai hukum adat. hak atas tanah dalam wilayahnya masing-masing, penggunaannya atas dasar hak pakai. Pemerintahan kadie juga diberi kekuasaan penuh oleh pemerintah pusat mempertahankan tanah dan wilayah kekuasaannya, berkewajiban mengatur penggunaan tanah. menguasai hutan dan pengambilan hasil hutan. Penjelasan mengenai Sarana Barata akan dikemukakan secara khusus dalam 4 Barata Kesultanan Buton sebagai sistem pemerintahan dan pertahanan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- a) Latar belakang adanya pejabat kesultanan buton pada abad ke-20 yaitu Deskripsi tentang wilayah kekuasaan Buton dalam konstruksi kolonial secara jelas baru dapat diketahui dalam abad ke-19 yakni mencakupi pulau Muna, yang dimana Muna adalah Pangsane atau Pancano yang diberikan oleh orang Ternate dan orang Buton menyebutnya sebagai daerah Pancana. Adapun wilayah kekuasaan Buton menyatu dengan daratan pulau Sulawesi yakni poleang dan Rumbia. Kedua daerah ini berbatasan di sebelah barat dengan wilayah Luwu, sebelah utara dengan Laiwui dan sebelah timur dengan Selat tiworo (Zuhdi, 2010: 39). Pembagian kelompok di majelis yang diatur dalam UU yang disebut Tutura ini adalah sebagai berikut: Eksekutif = Sara Pangka; Legislatif = Sara Gau; Yudikatif = Sara Bitara. Ada 114 anggota majelis Sara buton yang terdiri dari 3 fraksi; Fraksi rakyat = Beranggotakan 30 menteri/bonto ditambah 2 menteri besar yang juga mewakili pemukiman-pemukiman di wilayah Buton; Fraksi pemerintahan = Pangka, Bobato, lakina Kadie yang mewakili pemerintahan.;Fraksi Agama = Diwakili oleh pejabat lingkungan sarakidina/sarana hukum yang berkonsentrasi di masjid agung kesultanan Buton. Wilayah Kesultanan ya meliputi pulau Buton secara keseluruhan, pulau Muna bagian selatan, kepulauan Tukang Besi, pula Wawonii dan Jazirah Tenggara daratan pulau Sulawesi. Undang-undang "Murtabat Tujuh Kesultanan Buton" ditetapkan sejak tahun 1610 di masa pemerintahan Sultan Dayanu Iksanuddin (1579- 1631). Undang-undang tersebut mengenal tiga tingkatan pemerintahan.
- b) Pada masa kejayaannya, Kesultanan Buton pernah menguasai Pulau Buton dan beberapa wilayah di provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk mendukung pemerintahannya, kesultanan ini menjalin hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan di Sulawesi dan Pulau Jawa. Hubungan itu membuat perekonomian Kesultanan Buton berkembang pesat, terutama dalam sektor perdagangan. Terlebih lagi, Buton termasuk wilayah strategis, yang sering dilalui oleh kapal dagang dari mancanegara. Selain itu, produksi rempah-rempahnya juga meningkat tajam. Dalam sejarah kesultanan Buton dari zaman Sultan dayanu ikhsanuddin (La

Elangi) sampai dengan zaman pemerintahan Sultan Falihi bahwa dijelaskan perangkat atau pejabat kesultanan buton sampai dengan pada abad ke-20 yaitu mempunyai peran dan fungsi sebagai berikut :1) Sultan; 2) *Pasopitumatana*; 3) Siolimbona; 4) *Sarana Hukumu*. Dari kesemua perangkat atau pejabat kesultanan buton dari zaman La Elangi sampai dengan Sultan Falihi tentunya masih mempunyai peran dan fungsi yang sama sampai sekarang ini.

.DAFTAR PUSTAKA

- Anceaux, J.C. 1987. *Wolio Dictionary (Wolio-English-Indonesia)*. Kamus Bahasa Wolio (Wolio-Inggris-Indonesia). Dorddech: Forris
- Berg, E.J. Van den. 1939. *Adatgetbruikenin verband met the sultanistallatie in Boeton*. TBG 79: 469-528
- Kartodirjo, Sartono. 1986. *Sejarah Perjuangan Pergerakan Kebangsaan Indonesia*. Erlangga. Jakarta.
- Kartodirdjo. 1992. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Schoorl. J.W. 2003. *Sejarah dan Budaya Masyarakat Buton*. Djambatan, KITLV. Huizen (Nederland)
- Yunus, Abd. Rahim. 1996. *Posisi Tasawuf Dalam Sistem Pemerintahan Kesultanan Buton abad XIX*. Jakarta. INIS
- Zahari, A.M . 1977 *Sejarah dan Adat Fiy Darul Butuni*. Jakarta. Balai Pustaka.
- Zuhdi, Susanto. 1996. *Kerajaan Tradisional di Sulawesi Tenggara: Kesultanan Buton*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional
- Zuhdi. Sussanto. 1999. "Labu Rope Labu Wana: Sejarah Buton Abad 17 dan 18". Disertasi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Jakarta

